

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan, sebagai salah satu negara dengan industrialisasi paling pesat di dunia menghadapi tantangan besar dalam upaya mencapai transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam 5 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sangat bergantung pada sektor industri berat yang intensif energi seperti manufaktur kendaraan konvensional, produksi baja, dan pembangunan kapal pengangkut LNG.¹ Akibatnya, negara ini menduduki peringkat ke-9² sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di dunia menunjukkan bahwa emisi karbon Korea Selatan mencapai 635,5 juta ton, menyumbang sekitar 1,65% dari total emisi karbon dunia, dengan 77% bauran energinya masih didominasi oleh bahan bakar fosil pada tahun 2021.³

Sektor energi dan industri berat merupakan penyumbang terbesar terhadap emisi karbon Korea Selatan. Sektor baja, misalnya, memberikan kontribusi sekitar 15% dari total emisi nasional. Struktur produksinya masih didominasi oleh proses tanur

¹ Joojin Kim, "SOUTH KOREA Climate Transparency Report," 2022. Diakses dalam <https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2022/10/CT2022-South-Korea-Web.pdf> (28/07/2025, 18.00 WIB)

² Worldometer, "CO2 Emissions by Country -," *Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)*, 2022. Diakses dalam <https://www.worldometers.info/co2-emissions/co2-emissions-by-country/> (28/07/2025, 18.26)

³ Joojin Kim *Loc. Cit.*

sempur (blast furnace) sebesar 67% dari total produksi baja, yang menghasilkan emisi tinggi rata-rata 2,02ton karbon per ton baja mentah. Rendahnya proporsi energi terbarukan hanya sekitar 9% dari total pembangkit listrik pada 2023 menambah beban dalam upaya dekarbonisasi. Proses produksi di sektor petrokimia, semen, dan logam juga sangat intensif energi, menjadikan sektor-sektor ini kontributor besar terhadap total emisi nasional. Ketergantungan pada batu bara dan gas alam tidak hanya meningkatkan emisi, tetapi juga membuat biaya energi domestik tidak efisien. Pemerintah masih dinilai belum memiliki kebijakan yang cukup kuat untuk memperluas energi terbarukan dan menekan penggunaan batu bara.⁴

Korea menempati posisi ketiga dunia dalam jumlah paten teknologi iklim, inovasi tersebut masih terkonsentrasi pada segelintir perusahaan besar dan belum menyebar secara nasional. Sektor-sektor beremisi tinggi seperti kimia, refinari, dan baja masih menunjukkan kelemahan dalam pengembangan teknologi pengurangan emisi seperti *Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS)*. Banyak riset yang dilakukan masih bersifat inkremental, bukan inovasi radikal yang mampu menciptakan lompatan besar dalam efisiensi energi atau penangkapan karbon. Oleh karena itu, Korea membutuhkan kolaborasi dan transfer teknologi internasional, baik dalam bentuk kerja sama penelitian, investasi asing, maupun pelatihan tenaga ahli.⁵ Namun,

⁴ Jeong Ha-young, “Carbon Neutrality and the Challenges of the Steel Industry: Lack of Awareness of Weakened Competitiveness Is the Biggest Challenge” 15 (2024). Diakses dalam <https://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=38056> (30/09/2025 1.23 WIB)

⁵ Lee Dong-won, “The Path to a Carbon-Neutral Economy (1): Current Status and Characteristics of Climate Tech in Korea,” no. 1 (2025): 1–13. Diakses dalam <https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?menuNo=201106&nttId=10088607> (30/09/2025 1.37 WIB)

Korea menempati peringkat ke-63 dari 64 negara dalam *Climate Change Performance Index (CCPI)*, yang mencerminkan ketertinggalan signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Mahkamah Konstitusi Korea bahkan menyatakan bahwa rencana pengurangan emisi nasional tidak konstitusional karena tidak memiliki strategi pasca-2030 yang jelas dan gagal melindungi hak dasar generasi mendatang.⁶

Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana strategi pemerintah Korea Selatan dalam menarik investasi asing berperan sebagai instrumen kunci untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mencapai target netralitas emisi nasional pada tahun 2050. Foreign Direct Investment (FDI) juga dinilai krusial untuk memperkuat pendanaan riset dan mempercepat transfer teknologi dari negara-negara maju. Dengan melibatkan sektor swasta dan akademisi dalam penelitian kolaboratif, Korea dapat mempercepat pencapaian target *net-zero emission* tahun 2050. Sebagai respons, Korea Selatan menunjukkan tekad kuat melalui kebijakan progresif seperti *Green New Deal*, Zona Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta *Green Taxonomy Korea* guna mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan transisi menuju netralitas karbon.

Green New Deal Korea Selatan berfokus pada transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan, dan mengurangi biaya sosial melalui investasi hijau dan digital. Kebijakan ini menjadi simbol komitmen

⁶ Ji Hyuk-min, "South Korea Ranks 63rd out of 64 Countries in Climate Change Response, a Shocking Result.," 2024. Diakses dalam <http://www.netzeronews.kr/news/articleView.html?idxno=1735> (30/09/2025 01.58 WIB)

nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mendorong dekarbonisasi lintas sektor industri, serta memperkuat bauran energi terbarukan sebagai pilar utama menuju net-zero emissions.⁷ Zona Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas di Korea Selatan difokuskan untuk menarik investasi asing pada sektor energi bersih, petrokimia, dan teknologi rendah karbon. Kawasan Ulsan menjadi pusat penting dengan ekosistem industri hijau berorientasi ekspor, sementara berbagai inisiatif hidrogen internasional turut memperkuat peran Korea dalam membangun ekonomi hidrogen global dan sistem energi masa depan.⁸ Korea Selatan menetapkan *Green Taxonomy* pada 2021 sebagai panduan bagi perusahaan dan investor untuk memastikan manfaat lingkungan nyata. Kebijakan ini bertujuan menyalurkan arus keuangan secara efisien ke inisiatif hijau dengan menetapkan tujuan lingkungan spesifik, menyelaraskan praktik pembiayaan dengan standar global, serta mempertimbangkan aktivitas transisi menuju masyarakat hijau.⁹

Studi strategi Korea Selatan dalam menarik investasi asing penting untuk mendukung target netral karbon 2050. Kebijakan seperti Green New Deal, K-Taxonomy, dan Zona Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas diarahkan

⁷ Jae Hyup Lee and Jisuk Woo, "Green New Deal Policy of South Korea: Policy Innovation for a Sustainability Transition," *Sustainability (Switzerland)*, 2020, <https://doi.org/10.3390/su122310191>.

⁸ Kessia Kopecky, "K E M B A L I SIARAN PERS : Edmonton Global Dan Zona Ekonomi Bebas Ulsan Bermitra Untuk Mempercepat Penggunaan Dan Inovasi Hidrogen Kutipan," 2024, 1–6. Diakses dalam <https://edmontonglobal.ca/news/media-release-edmonton-global-and-ulsan-free-economic-zone-partner-to-accelerate-hydrogen-use-and-innovation/> (09/03/2025 02.02 WIB)

⁹ Hyoung-Seok Lim, "Mobilizing Green Finance through K-Taxonomy," 2021. Diakses dalam <https://development.asia/insight/mobilizing-green-finance-through-k-taxonomy> (17/072025 07.45 WIB)

untuk mempercepat pengembangan teknologi hijau, meski tantangan masih ada akibat ketergantungan fosil dan lambatnya pertumbuhan energi terbarukan. Dukungan investasi asing, transfer teknologi, dan kebijakan tepat sasaran menjadi kunci dalam memperkuat kapabilitas teknologi hijau serta daya saing industry.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk merumuskan masalah:
Bagaimana strategi Pemerintah Korea Selatan dalam menarik investasi asing dapat mendukung pencapaian target emisi karbon yang telah ditetapkan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Korea Selatan dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik bagi sektor rendah karbon serta mengungkap dan menjelaskan kebijakan utama yang dirancang oleh Pemerintah Korea Selatan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1.3.2.1 Manfaat Akademik

Secara akademis dengan penjelasan sistematis dan juga pemaparan fenomena, bahwa penelitian ini memberikan nilai tambah bagi kajian hubungan internasional terhadap bagaimana strategi pemerintah korea selatan dalam menarik investasi asing dapat mendukung pencapaian target emisi karbon yang telah ditetapkan

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti akan memiliki akses ke informasi lebih lanjut mengenai Pemerintah Korea Selatan yang terfokus pada strategi investasi asing dengan target emisi karbon yang sesuai dengan komitmen internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu disini berisi penelitian-penelitian terdahulu baik yang sudah dipublikasikan serta terkait untuk menjadi acuan dan referensi utama dalam penelitian ini yang mengambil judul **Strategi Pemerintah Korea Selatan dalam Menarik Investasi Asing untuk Mencapai Target Emisi Karbon.**

Penelitian terdahulu pertama berjudul *Diplomasi Komersial Indonesia Dalam Menarik Investasi Dari Korea Selatan Pada Industri Kendaraan Listrik* merupakan skripsi yang ditulis oleh Vebyan Syafitra menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang membahas strategi diplomasi komersial Indonesia untuk menarik investasi Korea Selatan dalam industri kendaraan listrik selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ¹⁰. Indonesia memanfaatkan sumber daya alam, terutama nikel, serta kebijakan seperti Perpres No. 55/2019 untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik, dengan Hyundai sebagai investor utama dalam ekosistem EV. Melalui diplomasi komersial berupa promosi investasi, kerja sama teknologi, dan kontrak strategis, Indonesia berhasil menarik investor global, khususnya dari Korea Selatan, guna mendorong alih teknologi dan pertumbuhan ekonomi hijau.

¹⁰ Syafitra Vebyan, "Diplomasi Komersial Indonesia Dalam Menarik Investasi Dari Korea Selatan Pada Industri Kendaraan Listrik," *Universitas Andalas 2*, no. 2016 (2023): 13–41.

Persamaan penelitian terletak pada tujuan transisi energi hijau dan pembangunan berkelanjutan, namun Indonesia menekankan pemanfaatan sumber daya lokal, sementara Korea Selatan fokus pada reformasi struktural dan insentif internasional untuk menarik investasi.

Penelitian terdahulu kedua berjudul *Upaya Pemerintah China dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Clean Development Mechanism (CDM)* merupakan jurnal yang ditulis oleh Bunga Ayu Swastika menggunakan metode deskriptif-analisis yang membahas tentang bagaimana China menerapkan mekanisme CDM sebagai bentuk implementasi Protokol Kyoto¹¹. CDM menjadi strategi China untuk menurunkan emisi GRK sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan melalui teknologi batu bara bersih, penangkapan karbon, pembatasan plastik, dan regulasi kendaraan. Kebijakan ini memanfaatkan investasi asing, transfer teknologi, serta mekanisme internasional guna menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Persamaannya dengan Green Growth Korea Selatan terletak pada tujuan mengurangi emisi dan transisi energi rendah karbon melalui kerja sama global, namun China lebih fokus pada efisiensi domestik dan kredit karbon, sementara Korea Selatan mengintegrasikan kebijakan ramah lingkungan dengan insentif investasi asing.

Penelitian terdahulu ketiga berjudul *Kebijakan Investasi Asing dalam Perspektif Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* merupakan jurnal artikel ditulis oleh Muhkamat Anwar menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif

¹¹ Bunga Ayu Swastika, "Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Kaca Melalui Cdm (Clean Development) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol," *Unej Journal I*, no. I (2014): 1–14.

untuk menelaah bagaimana regulasi investasi asing di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹² Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, serta kebijakan pemerintah yang pro-investasi agar Indonesia mampu menarik arus modal asing, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi asing tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga harus diatur agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus membahas strategi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang menarik investasi asing sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional. Dari sisi teori, keduanya sama-sama menyoroti peran negara dalam teori pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya kebijakan regulatif dan insentif bagi pertumbuhan. Perbedaannya, penelitian Muttaqin menitikberatkan pada kebijakan investasi asing di Indonesia dalam perspektif pertumbuhan ekonomi dan kepastian hukum, tanpa mengaitkannya dengan isu lingkungan dan emisi karbon.

Penelitian terdahulu keempat yang berjudul *Inisiatif Green Growth: Kontribusi Korea Selatan dalam Mitigasi Krisis Lingkungan Internasional* merupakan jurnal tulisan Ahmad Farhan dan M. Syaprin Zahidi¹³. Penelitian ini menggunakan

¹² Muhkamat Anwar, "Ekonomi Dan Multilateral," *Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan*, 2022.

¹³ Ahmad Farhan and M Syaprin Zahidi, "Inisiatif Green Growth : Kontribusi Korea Selatan Dalam Mitigasi Krisis Lingkungan Internasional," *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2023): 245–57.

metode kualitatif dengan pendekatan naratif dan data primer-sekunder untuk mengkaji Kebijakan Green Growth Korea Selatan yang diterapkan sejak 2009 melalui Five-Year Plan, mencakup pengurangan emisi, pengembangan energi ramah lingkungan, dan revitalisasi lingkungan. Dengan teori middle power diplomacy, Korea berperan sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang lewat inisiatif GGGI dan GCF, serta mendukung transfer teknologi hijau. Keberhasilan tampak di forum internasional seperti UNFCCC dan mekanisme CDM, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring mitigasi krisis lingkungan, sekaligus menjadikan Korea Selatan model global pembangunan hijau. Persamaannya dengan tulisan ini ada pada fokus pengurangan emisi dan keberlanjutan, sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak membahas investasi asing.

Penelitian terdahulu kelima berjudul *Upaya Korea Selatan Dalam Mencegah Terjadinya Perubahan Iklim Melalui Sistem Penanganan Dan Pengelolaan Sampah* merupakan jurnal tulisan Fadia Salsabillah yang mengeksplorasi peran pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi masalah perubahan iklim melalui sistem pengelolaan sampah yang inovatif¹⁴. Jurnal ini dengan metode deskriptif menunjukkan keberhasilan Korea Selatan dalam mengurangi emisi karbon melalui sistem ekonomi sirkular, seperti daur ulang yang menekan emisi hingga 412.000 ton per tahun, penggunaan smart bin berbasis RFID, dan pemanfaatan gas metana dari TPA Sudokwon untuk energi, sehingga tingkat daur ulang meningkat hingga 60%. Sistem

¹⁴ Fadia Salsabillah, "Upaya Korea Selatan Dalam Mencegah Terjadinya Perubahan," *Researchgate.Net*, no. June (2022): 1–11.

ini mendukung kebijakan iklim dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon. Persamaannya dengan tulisan ini terletak pada fokus penggunaan teknologi hijau dalam mitigasi emisi, sedangkan perbedaannya adalah kebijakan pengelolaan sampah menitikberatkan pada infrastruktur domestik dan partisipasi masyarakat, sementara strategi investasi asing lebih menekankan reformasi kebijakan dan insentif finansial untuk menarik perusahaan global.

Penelitian terdahulu keenam berjudul *Do Foreign Investors Affect Carbon Emission Disclosure? Evidence from South Korea* merupakan jurnal yang ditulis oleh Kim Eunsoo dkk yang dikaji menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi logistik. Data diambil dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Korea (KSE) dan KOSDAQ antara tahun 2014 hingga 2019¹⁵. Jurnal ini menyoroti peran penting investor asing dalam mendorong perusahaan Korea Selatan mengungkapkan emisi karbon secara sukarela untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi di pasar modal. Perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi lebih cenderung terlibat dalam praktik ESG, meningkatkan tata kelola, dan menarik kepercayaan pasar melalui platform seperti *Carbon Disclosure Project*. Berdasarkan teori akuntansi, agency, dan keberlanjutan, pengungkapan ini memperkuat akuntabilitas sekaligus reputasi global perusahaan. Perbedaannya, investor asing berfokus pada mekanisme pasar dan pengawasan korporat, sedangkan

¹⁵ Eunsoo Kim, Suyon Kim, and Jaehong Lee, "Do Foreign Investors Affect Carbon Emission Disclosure? Evidence from South Korea," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 19 (2021), <https://doi.org/10.3390/ijerph181910097>.

kebijakan pemerintah Korea Selatan menargetkan pengurangan emisi secara nasional melalui instrumen seperti K-ETS, energi terbarukan, dan bauran nuklir untuk mencapai netral karbon 2050.

Penelitian terdahulu ketujuh berjudul *Green Foreign Direct Investment in Developing Countries* merupakan jurnal artikel tulisan Lise Johnson.¹⁶ Artikel ini menggunakan kajian literatur dan analisis kebijakan untuk mengulas bagaimana *Green Foreign Direct Investment (GFDI)* dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana FDI mampu membawa transfer teknologi ramah lingkungan, meningkatkan kapasitas produksi hijau, dan memperkuat daya saing global, dengan syarat adanya dukungan regulasi, kebijakan insentif, serta kesiapan infrastruktur domestik. Artikel ini menekankan bahwa GFDI tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon. Namun, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara tuan rumah dalam menyerap teknologi, kualitas institusi, serta konsistensi regulasi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada peran strategis investasi asing dalam mendukung transisi hijau dan pengurangan emisi karbon, di mana keduanya menegaskan bahwa FDI dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai target iklim global. Penelitian Lise Johnson juga memanfaatkan kerangka *green economy theory* yang menekankan keterkaitan antara investasi asing, transfer teknologi, dan pencapaian

¹⁶ Lise Johnson, "Green Investment, Form of Youth Contribution to the Environment," *Columbia Law School*, 2023.

target lingkungan. Perbedaannya, artikel Lise Johnson menekankan konteks negara berkembang secara umum, dengan fokus pada peluang dan tantangan penerapan GFDI di berbagai kawasan, sedangkan penelitian lebih spesifik membahas Korea Selatan sebagai negara industri maju yang justru memanfaatkan strategi kebijakan dan insentif untuk menarik FDI hijau guna mempercepat transisi energi dan mencapai target net-zero emission 2050.

Penelitian terdahulu kedelapan berjudul *Greenfield Investments: An Economic and Financial Key Driver for India's Growth* merupakan jurnal artikel yang ditulis oleh Swastika Tripathi, Manjula Jain, dan Viksit Tripathi menggunakan kajian literatur dan analisis deskriptif untuk membahas peran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) khususnya melalui skema greenfield investment dalam mendukung pertumbuhan ekonomi India sekaligus menangani isu lingkungan.¹⁷ Studi ini menjelaskan bahwa greenfield FDI membawa keuntungan berupa aliran modal asing, transfer teknologi, peningkatan daya saing ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta peluang penerapan standar lingkungan yang lebih baik. Selain itu, kebijakan liberalisasi FDI oleh Pemerintah India memperkuat arus investasi pada sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan manufaktur. Temuannya menekankan bahwa keberhasilan greenfield investment sangat bergantung pada faktor sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam, pembentukan

¹⁷ Manjula Jain, Swastika Tripathi, and Viksit Tripathi, "Mini Review Greenfield Investments : An Economic and Financial Key Driver for India ' s Growth," *Management and Economics Research Journal*, no. February (2019), <https://doi.org/10.18639/MERJ.2019.739951>.

modal, perkembangan teknologi, serta stabilitas sosial-politik. Persamaan dengan penelitian ini adalah focus pada strategi negara dalam memanfaatkan investasi asing langsung untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat daya saing ekonomi sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim. Perbedaannya, lebih berfokus pada dampak greenfield FDI terhadap pertumbuhan ekonomi India dan bagaimana kebijakan liberalisasi investasi memperkuat arus modal asing, sedangkan penelitian ini menganalisis instrumen kebijakan dan insentif pajak, fiskal hijau, deregulasi, dan regulasi ramah investor yang dipakai untuk menciptakan iklim investasi hijau.

Penelitian terdahulu kesembilan berjudul *Green Finance in Singapore: Baby Steps to Environmental Protection?* merupakan artikel yang ditulis oleh Joseph Chun menggunakan metode kajian yuridis dan analisis kebijakan dengan menelaah berbagai regulasi, inisiatif pasar, serta instrumen keuangan berkelanjutan yang diterapkan Singapura untuk memposisikan diri sebagai pusat keuangan hijau di Asia.¹⁸ Tulisan ini menguraikan strategi utama Monetary Authority of Singapore (MAS), termasuk *Green Finance Action Plan*, penerbitan obligasi hijau hingga US\$35 miliar, *sustainable bond grant scheme*, pengembangan taksonomi hijau ASEAN, serta langkah mencegah *greenwashing* melalui regulasi dan kewajiban *disclosure*. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Singapura berhasil membangun reputasi sebagai hub keuangan hijau

¹⁸ Joseph Chun, “Green Finance in Singapore : Baby Steps to Environmental Protection ?,” no. April 2022 (2023): 1–31, [https://doi.org/Chun, Joseph, Green Finance in Singapore: Baby Steps to Environmental Protection? \(March 3, 2023\). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4590670 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4590670](https://doi.org/Chun, Joseph, Green Finance in Singapore: Baby Steps to Environmental Protection? (March 3, 2023). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4590670 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4590670).

terbesar di ASEAN, kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi masih terbatas karena dominasi proyek-proyek besar dan perusahaan mapan, sedangkan dukungan untuk UMKM dan sektor dengan dampak langsung lingkungan masih minim. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas strategi negara dalam memobilisasi investasi hijau untuk mencapai target net-zero 2050, dengan menekankan peran kebijakan publik, regulasi, dan instrumen pasar. Perbedaan terdapat pada, penelitian Joseph Chun berfokus pada instrumen keuangan dan regulasi Singapura sebagai pusat keuangan global, sedangkan penelitian ini menilai keterkaitan antara investasi asing dengan penurunan emisi karbon, yaitu bagaimana modal asing mempercepat pembangunan infrastruktur hijau dan adopsi teknologi rendah emisi.

Penelitian terdahulu kesepuluh berjudul *Institutionalisation of Climate Policy and Carbon Markets in the Paris-era* merupakan disertasi yang ditulis oleh Jihyung Joo di University of Leeds.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan, wawancara mendalam terhadap 40 aktor kebijakan, serta telaah dokumen internasional dan nasional. Disertasi ini menyoroti perubahan institusi kebijakan iklim global dan pasar karbon dari era Kyoto hingga Paris, dengan fokus pada evolusi Korean Emissions Trading Scheme (K-ETS) serta proses penetapan target netral karbon 2050 di Korea Selatan. Temuannya menunjukkan bahwa perubahan institusional cenderung inkremental dan fragmentaris, dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Joo juga membandingkan perbedaan K-

¹⁹ Jihyung Joo, "Institutionalisation of Climate Policy and Carbon Markets in the Paris-Era" (2022).

ETS dengan EU ETS melalui perspektif *institutional complementarity*, menemukan bahwa K-ETS berkembang lebih regulatif karena model negara yang kuat dan liberalisasi energi yang belum tuntas, berbeda dengan EU ETS yang berakar pada struktur politik terdesentralisasi. Disertasi ini menggunakan teori Discursive Institutionalism dan Historical Institutionalism untuk menjelaskan bagaimana ide, aktor, dan struktur institusi berinteraksi dalam membentuk kebijakan. Perbedaannya dengan penelitian ini, Joo menitikberatkan pada proses institusionalisasi dan dinamika politik domestik dalam kebijakan iklim, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pemerintah Korea Selatan menarik investasi asing melalui instrumen regulasi, insentif fiskal, dan kolaborasi internasional guna mencapai target emisi karbon nasional. Persamaan penelitian Anda dengan tulisan Joo Jihyung terletak pada fokus keduanya yang sama-sama membahas strategi Korea Selatan dalam mencapai target netral karbon 2050 serta menekankan peran kebijakan nasional dan instrumen pasar karbon (K-ETS) sebagai instrumen penting dalam transisi rendah emisi. Keduanya juga sama-sama menyoroti bahwa pencapaian target iklim membutuhkan dukungan aktor internasional dan penataan institusional yang kuat agar efektif.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

NO	Judul	Jenis Penelitian dan Analisa Data	Hasil Pembahasan
1.	Diplomasi Komersial Indonesia Dalam Menarik Investasi Dari Korea Selatan Pada Industri Kendaraan Listrik	Metode penelitian deskriptif kualitatif –	Indonesia memanfaatkan sumber daya alam seperti nikel dan diplomasi komersial untuk menarik investasi, khususnya dari Korea Selatan, dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik dan ekonomi hijau.

	Skripsi oleh Vebyan Syafitra dari Universitas Andalas	Konsep diplomasi komersial	
2.	Upaya Pemerintah China dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Clean Development Mechanism (CDM) Skripsi oleh Bunga Ayu Swastika dari Universitas Jember	Metode deskriptif-analisis Konsep kebijakan public menurut George C. Edward III	Clean Development Mechanism (CDM) menjadi langkah strategis bagi negara berkembang seperti China untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan melalui adopsi teknologi bersih, pengaturan kebijakan nasional, dan pemanfaatan investasi asing dalam kerangka mekanisme internasional.
3.	Kebijakan Investasi Asing dalam Perspektif Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Jurnal artikel oleh Muhkam Anwar dari Politeknik Keuangan Negara STAN	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif Green Econpmy theory	<i>Kebijakan Investasi Asing dalam Perspektif Hukum Investasi Internasional</i> membahas bagaimana regulasi investasi asing di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip hukum internasional dan pentingnya kepastian hukum dalam menarik investor. Meskipun investasi asing berperan vital bagi pembangunan ekonomi, tetap diperlukan regulasi yang menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi kepentingan nasional.
4.	Inisiatif Green Growth: Kontribusi Korea Selatan dalam Mitigasi Krisis Lingkungan Internasional Jurnal artikel oleh Ahmad Farhan dan M. Syaprin Zahidi dari Universitas Muhammadiyah Malang	Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif Teori middle power diplomacy	Kebijakan Green Growth Korea Selatan bertujuan memperbaiki dampak industrialisasi melalui pengurangan emisi, pengembangan energi ramah lingkungan, dan revitalisasi ekosistem, sambil memanfaatkan diplomasi middle power untuk mempromosikan model pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
5.	Upaya Korea Selatan Dalam Mencegah Terjadinya Perubahan Iklim Melalui Sistem Penanganan Dan Pengelolaan Sampah	Metode penelitian deskriptif	Korea Selatan mengadopsi sistem ekonomi sirkular berbasis teknologi, seperti smart bin dan pemanfaatan gas metana dari TPA, untuk meningkatkan efisiensi daur ulang dan menekan emisi karbon sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim.

	Jurnal artikel oleh Fadia Salsabillah daei Universitas Negeri Jakarta		
6.	<p>Do Foreign Investors Affect Carbon Emission Disclosure? Evidence from South Korea</p> <p>Jurnal artikel oleh Kim Eunsoo, Kim Suyon, dan Lee Jaehong dari Universitas Samyung</p>	<p>Metode analisis kuantitatif dengan model regresi logistik.</p> <p>Landasan agency theory</p>	<p>Pengungkapan emisi karbon oleh investor asing di Korea Selatan meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi di pasar modal, dan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik keberlanjutan melalui aktivitas ESG dan tata kelola yang lebih baik.</p>
7.	<p><i>Green Foreign Direct Investment in Developing Countries</i></p> <p>Jurnal artikel oleh Lise Johnson dari Columbia Law School</p>	<p>Metode Penelitian deskriptif</p>	<p>Menekankan bagaimana FDI dapat menjadi sarana penting bagi negara berkembang untuk memperoleh teknologi ramah lingkungan, meningkatkan standar keberlanjutan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan guna mendukung pembangunan hijau. Efektivitas green FDI sangat dipengaruhi oleh kebijakan domestik, kerangka regulasi, dan komitmen pemerintah dalam menyelaraskan tujuan investasi dengan agenda lingkungan</p>
8.	<p>Greenfield Investments: An Economic and Financial Key Driver for India's Growth</p> <p>Jurnal artikel oleh Swastika Tripathi, Manjula Jain, dan Viksit Tripathi dari Universitas Inventris</p>	<p>Metode Penelitian deskriptif</p>	<p>pentingnya investasi greenfield sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi India, khususnya dalam memenuhi kebutuhan modal, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing global. Aliran FDI tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor industri, tetapi juga berkontribusi pada target keberlanjutan dengan mengurangi intensitas karbon sejalan dengan komitmen Paris Agreement.</p>
9.	<p>Green Finance in Singapore: Baby Steps to Environmental Protection?</p> <p>Jurnal artikel oleh Joseph Chun dari National University of Singapore (NUS)</p>	<p>Metode penelitian normatif</p>	<p>Singapura telah menerapkan berbagai langkah kebijakan dan aturan untuk memperluas pembiayaan hijau, seperti melalui Green Finance Action Plan, penerbitan obligasi hijau, serta penyusunan Singapore-Asia Taxonomy. Namun, penelitian ini menekankan bahwa walaupun instrumen keuangan hijau menunjukkan pertumbuhan signifikan, dampaknya terhadap pencapaian lingkungan nyata masih minim,</p>

			sementara mayoritas aliran dana di kawasan tetap diarahkan pada proyek-proyek berkarakter “brown”.
10.	Institutionalisation of Climate Policy and Carbon Markets in the Paris-era Disertasi oleh Jihyung Joo dari Universitas Leeds	Metode Penelitian kualitatif New Institutionalism theories	Kebijakan iklim dan pasar karbon di era Paris Agreement mengalami perubahan yang bersifat inkremental dan terfragmentasi , karena benturan ide dan kekuatan politik membatasi laju transformasi. Di Korea Selatan, meskipun target net-zero 2050 berhasil ditetapkan, strategi jangka panjangnya belum terinstitusionalisasi kuat akibat dominasi warisan <i>developmental state</i> dan resistensi aktor ekonomi.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Green Economy Theory

Perekonomian dunia dihadapkan pada tantangan serius berupa krisis lingkungan, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, paradigma pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional dianggap tidak lagi relevan. Ketidakseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan mendorong lahirnya teori *Green Economy* atau ekonomi hijau sebagai pendekatan alternatif. Teori ini bertujuan untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan sosial. Dalam konteks ini, teori ekonomi hijau bukan hanya wacana normatif, melainkan sebuah kerangka konseptual yang mampu membimbing arah kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.²⁰

²⁰ Anwar, “Ekonomi Dan Multilateral.” Hal. 4.

Konsep ekonomi hijau pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh David Pearce, Anil Markandya, dan Edward Barbier dalam buku berjudul *Blueprint for a Green Economy* pada tahun 1989. Dalam kajian tersebut, mereka menyoroti kegagalan ekonomi konvensional dalam menghitung eksternalitas lingkungan yakni biaya lingkungan yang tidak tercermin dalam harga pasar. Ketika polusi, degradasi lahan, dan kerusakan ekosistem tidak diperhitungkan dalam proses produksi dan konsumsi, maka keputusan ekonomi yang dihasilkan menjadi bias dan tidak efisien secara ekologis. Oleh karena itu, pendekatan green economy menekankan pentingnya internalisasi biaya lingkungan, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang benar-benar mencerminkan realitas ekologis.²¹

Sementara itu, UNEP (United Nations Environment Programme) menjelaskan bahwa green economy sebagai kerangka pembangunan global, khususnya pasca krisis keuangan dunia. UNEP mendefinisikan green economy sebagai "sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya." Dalam pengertian ini, ekonomi hijau bukan hanya soal pelestarian alam, tetapi juga transformasi sistem ekonomi agar mampu menghargai modal alam dan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Sejak tahun 2010, UNEP menjadikan green economy sebagai pilar utama Sustainable Development Goals (SDGs), menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa

²¹ Edward B. Barbier and Anil Markandya, *A New Blueprint for a Green Economy, A New Blueprint for a Green Economy*, 2013, <https://doi.org/10.4324/9780203097298>. hal. 10-14

perubahan mendasar pada arah kebijakan ekonomi global. Pendekatan ini mendorong transisi menuju energi bersih, pembangunan rendah karbon, serta pengurangan ketimpangan sosial melalui inovasi teknologi, investasi hijau, dan kebijakan fiskal berorientasi lingkungan.²²

Di sisi lain, Tarkhanova turut memperkuat green economy theory melalui kajian mendalam terhadap indikator, investasi, dan instrumen kebijakan. Kajian ini memandang green economy sebagai pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi ke dalam kerangka kebijakan fiskal, investasi, dan kelembagaan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa, transformasi ekonomi hijau sangat bergantung pada peran investasi hijau, insentif fiskal, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen global untuk menurunkan emisi karbon, mengembangkan energi terbarukan, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat rentan.²³ Kemudian kajian analisis M. Firmansyah, yang mengkaji turunan dari *green economy theory* menunjukkan bahwa penerapannya tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam berbagai sektor strategis. Penerapan konsep ini tampak pada pengembangan green job atau pekerjaan hijau, yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sektor-

²² R. P. Aprillia, "Penerapan Green Economy Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Relevansinya Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Yayasan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Wahyu Alam Desa Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri) (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri).," *Journal GEEJ 7*, no. 2 (2024): 23–51. Hal. 20.

²³ Anhelica V. Frieler Natalia A. Baburina Elena A. Tarkhanova, Elena L. Chizhevskaya, "GREEN ECONOMY IN RUSSIA: THE INVESTMENTS' REVIEW, INDICATORS OF GROWTH AND DEVELOPMENT PROSPECTS" 8, no. 2 (2020): 649–61.

sektor seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan transportasi berkelanjutan menjadi contoh konkret penerapan prinsip tersebut. Selanjutnya, green tourism atau pariwisata hijau mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi hijau melalui prinsip konservasi, pemberdayaan komunitas lokal, serta keseimbangan ekologis dalam pengembangan destinasi wisata. Di sisi lain, instrumen keuangan seperti green finance dan green investment menjadi sarana penting dalam mendukung proyek ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan, termasuk kredit dan obligasi hijau.²⁴ Analisis M. Firmansyah menegaskan bahwa keseluruhan turunan ini berperan penting dalam memperkuat daya dorong teori ekonomi hijau sebagai model pembangunan yang integratif, adaptif terhadap perubahan iklim, serta relevan dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi global.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis menggunakan kajian green economy theory sebagai landasan analisis dalam memahami upaya Korea Selatan dalam menarik investasi asing untuk mencapai target emisi karbon. Konsep ini dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial secara terpadu. Dalam konteks Korea Selatan, yang menghadapi peningkatan emisi serta ketergantungan tinggi terhadap energi fosil, pendekatan ekonomi hijau menjadi relevan untuk menafsirkan kebijakan dekarbonisasi nasional. Berdasarkan pandangan Pearce, Markandya, dan Barbier, ekonomi hijau menuntut penerapan biaya lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi, sehingga

²⁴ M Firmansyah, "Konsep Turunan Green Economy Dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur," *Ecoplan 5*, no. 2 (2022): 141–49, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.543>. Hal. 4

pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi. Pemikiran ini diperkuat oleh UNEP, yang menekankan perlunya transformasi struktural melalui investasi hijau, efisiensi energi, dan inovasi teknologi bersih. Kajian Tarkhanova dan analisis M. Firmansyah menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau mencakup sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan green investment yang mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan. Dengan demikian, konsep ekonomi hijau memberikan kerangka teoritis yang komprehensif untuk menganalisis strategi Korea Selatan dalam mencapai net-zero emission 2050 serta menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji keadaan suatu kelompok, objek, kondisi tertentu, sistem pemikiran, atau jenis peristiwa pada masa kini. Tujuan utama metode ini adalah menyusun deskripsi, gambaran, atau representasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti ²⁵. Penelitian ini akan

²⁵ Mariana Kristiyanti, "Metode Penelitian CV. PUSTAKA STIMAR AMNI SEMARANG," 2023, 6. Hal 31.

menjelaskan bagaimana Strategi Korea Selatan menarik investasi asing untuk mencapai target emisi karbon.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel. Informasi dikaji dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, laporan lembaga internasional seperti International Trade administration dan Ministry of Economy and Finance, artikel penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan isu ekonomi hijau dan kebijakan penurunan emisi karbon di Korea Selatan. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konsep *green economy*, penerapannya dalam konteks pembangunan berkelanjutan, serta relevansinya terhadap strategi Korea Selatan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelusuri teori, temuan empiris, dan kebijakan yang telah ada sebagai dasar dalam merumuskan analisis dan kesimpulan penelitian.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengaitkan *green economy theory* dengan kebijakan aktual Korea Selatan dalam menarik investasi untuk menurunkan emisi karbon. Data yang digunakan berasal dari buku ilmiah, jurnal akademik, laporan lembaga internasional seperti *International Trade Administration* dan *Ministry of Economy and Finance* Korea Selatan, serta

dokumen resmi pemerintah dan publikasi organisasi internasional terkait pembangunan berkelanjutan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer berupa laporan dan kebijakan resmi pemerintah serta publikasi lembaga ekonomi dan lingkungan, dan data sekunder berupa hasil kajian pihak ketiga seperti artikel ilmiah dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan melalui tahapan pemilahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai keterkaitan antara teori, kebijakan, dan implementasi pembangunan berkelanjutan di Korea Selatan.

1.6.4 Ruang Lingkup penelitian

1.6.4.1 Batasan Waktu

Penelitian ini dibatasi pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2025. Pemilihan periode ini menandai fase pasca awal pandemi COVID-19, yang mendorong perubahan signifikan dalam arah kebijakan ekonomi Korea Selatan. Pada masa ini, pemerintah meluncurkan Korean Green New Deal sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi hijau (green recovery), dengan tujuan tidak hanya memulihkan perekonomian nasional, tetapi juga mempercepat transisi menuju sistem ekonomi rendah karbon. Pandemi menjadi momentum penting bagi Korea Selatan untuk mengalihkan fokus dari pertumbuhan berbasis industri konvensional menuju pembangunan berkelanjutan yang menekankan inovasi teknologi bersih, efisiensi energi, dan investasi hijau. Hingga tahun 2025, pemerintah menargetkan penguatan investasi hijau, pengembangan energi

terbarukan, serta penciptaan lapangan kerja berorientasi lingkungan sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap target net-zero emission 2050.

1.6.4.2 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini difokuskan pada strategi Pemerintah Korea Selatan dalam menarik investasi asing untuk mendukung pencapaian target emisi karbon. Penelitian ini hanya menelaah kebijakan, instrumen, dan program utama seperti *Korean Green New Deal*, *Green Taxonomy*, Zona Ekonomi Khusus, serta insentif fiskal dan non-fiskal yang berkaitan langsung dengan investasi asing di sektor hijau. Adapun aspek teknis di luar kebijakan, seperti detail teknologi energi terbarukan, dampak sosial budaya, maupun analisis kuantitatif emisi karbon, tidak menjadi cakupan pembahasan penelitian ini.

1.7 Argumen Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Korea Selatan menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan transisi menuju ekonomi rendah karbon di tengah ketergantungannya pada sektor industri berat dan energi fosil. Pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir telah menempatkan negara ini sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Namun, seiring meningkatnya tekanan global terhadap mitigasi perubahan iklim dan tuntutan keberlanjutan, pemerintah Korea Selatan menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan seperti *Korean Green New Deal*, *Green Taxonomy*, dan pengembangan *Zona Ekonomi Khusus* untuk menarik investasi asing di sektor hijau. Upaya ini bertujuan

untuk memperkuat pendanaan riset, mempercepat transfer teknologi rendah emisi, serta membangun fondasi ekonomi hijau yang mampu mendukung target *net-zero emission* tahun 2050.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan, penelitian ini dikaitkan dengan Green Economy Theory sebagai dasar analisis. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks Korea Selatan, pendekatan ekonomi hijau menjelaskan bagaimana strategi kebijakan investasi dan insentif fiskal dirancang untuk mendorong dekarbonisasi industri dan memperkuat inovasi teknologi bersih. Menurut Pearce, Markandya, dan Barbier, ekonomi hijau mengharuskan internalisasi biaya lingkungan dalam sistem ekonomi agar pembangunan tidak merusak ekosistem. Hal ini sejalan dengan kebijakan Korea Selatan yang mulai mengalihkan orientasi industrinya menuju energi terbarukan dan investasi ramah lingkungan.

Dengan menggunakan teori ekonomi hijau sebagai landasan analisis, penulis berargumen bahwa strategi pemerintah Korea Selatan dalam menarik investasi asing bukan semata langkah ekonomi, melainkan instrumen strategis dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui kebijakan investasi hijau, kolaborasi internasional, dan transfer teknologi, Korea Selatan berupaya memperkuat daya saing industrinya sekaligus memenuhi komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan pemerintah Korea Selatan sebagai bentuk penerapan ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih.

1.8 Struktur Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bab. Penulisan sederhana, sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Struktur Penulisan

BAB	JUDUL	PEMBAHASAN
I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Green Theory 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumen Pokok 1.8 Struktur Penulisan
II	Strategi Pemerintah Korea Selatan untuk Mencapai Target Emisi Karbon	2.1 Kebijakan Nasional untuk mencapai target emisi karbon. 2.2. Kerja Sama Internasional Korea Selatan dalam Upaya Mencapai Emisi Karbon 2.3 Peran Teknologi Hijau dalam Transisi Energi Korea Selatan
III	Analisis Strategi Korea Selatan untuk Menarik Investasi Asing	3.1 Korean Green New Deal sebagai Instrumen Strategis untuk Investasi Asing Ramah Lingkungan 3.2 Peran Zona Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dalam Menarik Investasi Asing ke Korea Selatan 3.3 Green Taxonomy Korea sebagai Instrumen Kebijakan dalam Seleksi Investasi Asing Ramah Lingkungan
IV	Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran